**ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN BUKIT PELANGI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Daniel Tiku1 , H. Marsuq2 , H. Maskan AF3**

1Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,Indonesia

2Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75234,Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui pelaksanaan environmental governance Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan melakukan pengumpulan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek kondisi sosial masyarakat yang telah berbeda saat ini di mana bukit pelangi telah menjadi kawasan favorit bagi warga sangat. Hal ini terlihat dari kondisi sosial masyarakat yang mulai berkumpul pada Kawasan Bukit Pelangi padahal sebelumnya banyak yang berkumpul di STQ atau Townhall. Masyarakat memperoleh manfaat sosial dari keberadaan RTH. Keberadaan RTH Bukit Pelangi sangat memberikan manfaat yang besar antara lain aktivitas-aktivitas komunitas dan kegiatan olahraga. Aspek sosial keberadaan RTH memang diperuntukkan untuk kegiatan sosial masyarakat hal ini mendukung agar kehidupan alam dan manusia yang berada di sekitar RTH sehat secara jasmani dan berinteraksi secara sosial. Pada aspek ekomomi masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi di area RTH Bukit pelangi dan pedagang-pedagang dapat berjualan dengan memanfaatkan food cord yang tersedia. Adapun yang tersedia adalah berbagai aneka jajanan dan minuman disamping itu ada juga tersedia permainan anak, kondisi ini medukung perekonomian masyarakat berputar dengan adanya RTH Bukut pelangi. Dari aspek ekologi pemilihan RTH sudah dianggap tepat dan masyarakat dapat memanfaatkan sebagai sarana pendidikan ekologi masyarakat khusus siswa-siswa yang ingin belajar. Namun terdapat kekurangan dalam hal spesies tanaman dan binatang khas Kalimantan seharusnya menjadi ciri khas RTH bukit pelangi ini. Kemudian dari aspek estetika menunjukkan RTH Bukit Pelangi kebanyakan menilai bahwa tampilan RTH sudah cukup menarik dan tertata rapi hal yang berikan kesan istimewa bagi masyarakat yang berkunjung. Disarankan untuk memperbanyak aneka macam flora dan fauna yang mencerminkan karakteristik taman Bukit Pelangi.

Kata Kunci: RTH, Environmental Governance, Penataan Ruang

**1. PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dalam segala aspek SDM, Pembangunan infrastruktur dan ekonomi dan hal ini dapat dilihat pada perkembangan kota-kota yang semakin pesat dari waktu-ke waktu. Kondisi kota diberbagai tempat di Indonesia saat ini sangat berkembang dengan pesat dengan pula dengan tingkat urbanisasi yang tinggi yang menyebabkan peledakan jumlah penduduk di perkotaan.

Perkembangan perkotaan ini diiringi dengan menurunnya kualitas lingkungan fisik dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan. Terutama terkait masalah lingkungan perkotaan yang masih belum menunjukkan kondisi yang mengembirakan dalam penataan berbasis lingkungan. Hal ini dapat dilihat dengan masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau ([RTH](https://www.kompasiana.com/tag/rth)) di berbagai kota di seluruh indonesia.

Kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap lingkungan terus dikembangkan. Berbagai program untuk meningkatkan kualitas lingkungan mulai digerakkan untuk menghindari kerusakan kota di masa depan. Pengelolaan fisik lingkungan kota diwujudkan pemerintah melalui program-program yang bertujuan meningkatkan keberlanjutan lingkungan kota (Lestari, 2014:381).

RTH dapat berbentuk hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, lapangan olahraga, jalur hijau, jalan raya, bantaran rel kereta api, dan bantaran sungai. Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai ruang alami merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu kota berkaitan dengan penanggulangan berbagai masalah lingkungan. Peran RTH dalam memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga kota namun keberadaannya sebagai sebuah ruang dengan fungsi ekologis menjadikan RTH sebagai salah satu fungsi lahan yang seringkali dikorbankan dalam membangun dan mengembangkan sebuah kota (Putri 2010:115).

Indonesia memiliki peraturan tentang ruang terbuka khususnya ruang terbuka hijau (RTH). Mulai dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan dalam undang-undang ditulis proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayahnya. Sementara, luasan ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayahnya.

Permasalahan minimnya luas RTH di kota-kota besar dapat disebabkan berbagai hal diantaranya minimnya lahan yang dimiliki pemerintah setempat untuk digunakan dan dikembangkan sebagai lahan RTH. Kemudian pada aspek pendanaanpemerintah tak memiliki dana untuk menambah ruang terbuka hijau. Selanjutnya masalah pembelian lahan untuk penggunaan ruang terbuka hijau tidak mudah karena lokasi yang cenderung strategis di pusat perkotaan sehingga memiliki harga yang mahal dan potensi konflik dapat terjadi.

Masalah yang cenderung paling berdampak pada pengelolaan ruang terbuka hijau adalah keterbatasan dana dan SDM yang kurang profesional, pemeliharaan ruang terbuka hijau yang kurang konsisten, dan pemilihan jenis tanaman tak sesuai persyaratan ekologis bagi masing-masing lokasi, termasuk langkanya lahan pembibitan tanaman penghijauan. Keterbatasan dana pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memerlukan terobosan pengembangan pola kemitraan hijau.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Putri (2013) menunjukkan penerapan prinsip-prinsip Good Environmental Governance dalam mengelola ruang terbuka hijau secara umum telah diterapkan dengan baik karena dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Lingkungan Hidup dan Instansi Terkait berdasarkan dengan Peraturan Daerah.

Penelitian terdahulu lain terkait environmental governance dilakukan Faisah & Prianto, (2015) menunjukkan tahap kolaborasi yang paling banyak berperan pada pengelolaan Taman kota adalah pemerintah, pemerintah mempunyai Tugas utama dalam pengelolaan Taman kota yang bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat dengan melakukan kerja sama (kolaborasi) pemerintah dapat melakukan pengelolaan dengan baik. Namun penelitian saat ini menekankan pada aspek-aspek environmental governance khususnya aspek lingkungan/ekologi, sosial, ekonomi dan estetika dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur.

Dari penjelasan dan permasalahan yang telah diuraikan maka penulis tertarik mengangkat sebuah judul skripsi dengan judul “Environmental governance Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur”

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan environmental governance Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur ?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pelaksanaan environmental governance Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di

Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur.

* 1. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi lembaga-lembaga yang membuat program, khususnya berkaitan environmental governance Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau.
2. Kegunaan Akademik, diharapkan penelitian ini, menjadi salah satu referensi akademis dalam bidang administrasi publik dan menjadi informasi awal bagi peneliti lainnya yang mengkaji konsep environmental governance.

**BAB. II TEORO KONSEP**

* 1. **Tinjauan Pustaka**
     1. **Konsep Governance**

Menurut Setyawan (2004:223) governance merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah government, yang menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. Konsep good governance muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Koiman (2003), governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Menerapkan praktik good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik (Maryam, 2016:2). Dijelaskan lebih lanjut bahwa eksistensi pemerintahan yang baik atau sering disebut good governance yang selama ini dieluelukan, faktanya saat ini masih menjadi mimpi dan hanyalah sebatas jargon belaka. Indonesia harus segera terbangun dari tidur panjangnya. Revolusi di setiap bidang harus dilakukan karena setiap produk yang dihasilkannya hanya mewadahi kepentingan partai politik, fraksi dan sekelompok orang.

Aktor-aktor good governance menurut Sedarmayanti (2009: 280), antara lain:

1. Negara/pemerintah: konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kegiatan kenegaraan, tetapi labih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masayarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dan dinasdinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara sebagai salah satu unsur governance, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.
2. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal. Dalam bidang pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan-yayasan yang mengelola sekolah swasta.
3. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan ada yang dinamakan Dewan Pendidikan yang merupakan lembaga independent yang memiliki posisi sejajar dengan Bupati/ Walikota dan DPRD.
   1. **Kerangka Pemikiran**

Environmental governance adalah adanya kesesuaian kebutuhan dan kesepakatan timbal balik antara sistem sosial dengan ekosistem, lebih dari itu sistem manajemen sosial perlu dijaga dengan mengedepankan nilai-nilai ekologis, dan perubahan iklim dapat dipelihara melalui pengawasan sistem sosial yang terbimbing oleh kaidah ekologis.

Alur ini menjelaskan tentang kerangka pikir yang mengarahkan penelitian agar dapat mencapai tujuan yaitu mengetahui dan menganalisa *Environmental Governance* dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur yang dianalisa melalui empat aspek yaitu sosial, ekonomi, lingkungan/ekologi dan aspek estetika. Penelitian ini melibatkan pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur dan masyarakat yang merasakan manfaat RTH.

**BAB. III. METODE PENELITIAN**

* 1. **Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur, dan di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi.

* 1. **Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2012:6).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan tipe atau jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya khususnya yang terkait Environmental governance Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur.

* 1. **Subyek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun subyek penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup BLH, Kabupaten Kutai Timur.
2. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, BLH, Kabupaten Kutai Timur
3. Pegawai dan Masyarakat di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, 4 Orang.
   1. **Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan untuk memperkuat penelitian.

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban atau informasi dari informan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Observasi dalam penelitian dilakukan dalam rangka melihat aktivitas di Lokasi penelitian.

1. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik di lokasi penelitian.

* 1. **Fokus Penelitian**

Adapun uraian atau deskripsi singkat terkait sejumlah yang menjadi fokus pada penelitian yaitu :

1. Aspek sosial mencakup keamanan dan partisipasi yang dapat memberikan ruang masyarakat seperti untuk melakukan kegiatan sosial yang aktif dan pasif di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur..
2. Aspek ekonomi, keberadaan ruang terbuka hijau memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar secara ekonomi di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur.
3. Aspek lingkungan yang memberikan manfaat meminimalisiri bahan-bahan polutan sehingga pencemaran dapat ditekan di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur.
4. Aspek estetika dengan meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro maupun makro di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur.
   1. **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017: 244).Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlansung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display,* dan *conclusion drawing/verification.*

**BAB. IV. PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat tentang gambaran umum Kabupaten Kutai Timur dan Kapabilitas Dynamic Governance Pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten (RTBL KSK) Kutai Timur.

1. **Deskripsi Lokasi Penelitian**

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kondisi geografi Kabupaten Kutai Timur yaitu memiliki luas wilayah 35.747,50 km², berpenduduk sebanyak 253.847 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010) dengan kepadatan 4,74 jiwa/km² dan pertumbuhan penduduk selama 4 tahun terakhir rata-rata 4,08% setiap tahun. Kutai Timur terletak di wilayah khatulistiwa dengan koordinat di antara 115°56'26"-118°58'19" BT dan 1°17'1" LS-1°52'39" LU.

Sedangkan dari kondisi Topoggrafi, Kutai Timur memiliki keadaan topografi yang bervariasi, mulai dari daerah dataran seluas 536.200 ha, lereng bergelombang (1,42 juta ha), hingga pegunungan (1,6 juta ha), tersimpan potensi batu bara 5,35 miliar ton.

* + 1. **Visi dan Misi**

Sejalan dengan arah pembangunan Kutai Timur Jangka Panjang Kabupaten Kutai Timur, yang diarahkan kepada terwujudnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya lokal menuju kemandirian daerah, maka Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 adalah:

Visi Dan Misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021

Visi :

“terwujudnya kemandirian kutai timur melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri”

Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.

2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri

3. Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata

4. Meningkatkan pengelolaan ruang untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih baik, lebih sehat dan nyaman bagi kehidupan manusia.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang frofesional, kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik .

Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur cukup bervariasi. Sebanyak 43,08 persen merupakan kawasan hutan, meliputi Hutan Mangrove, Hutan Primer, Hutan Rawa, Hutan Sekunder dan Hutan Tanaman. Hutan Primer sebagian besar berada pada daerah pegunungan yang tersebar pada bagian barat Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kecamatan Muara Wahau, Telen, dan Busang. Kawasan tidak berhutan di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 56,14 persen yang didominasi oleh belukar dan belukar rawa. Luas wilayah masingmasing sebesar 37,65 persen dan 5,76 persen.

Lahan pertanian sebanyak 9,28 persen atau sekitar 296.119,33 Ha; meliputi perkebunan, sawah dan lahan pekarangan. Penggunaan lahan untuk perikanan masih sangat kecil meskipun mempunyai potensi yang sangat besar baik budidaya kolam maupun perairan umum. Penggunaan lahan untuk kegiatan lainnya adalah pertambangan batubara sebesar 0,70 persen atau sekitar 22.410,51 Ha.

Penggunaan tanah untuk pertanian khususnya tanah sawah tiap tahun mengalami penyusutan luasan atau alih fungsi. Kondisi ini apabila dibiarkan dan tidak dilakukan upaya pencegahan alih fungsi, akan menjadi ancaman (hambatan) pembangunan sektor pertanian dimasa akan datang yang meliputi berkurangnya jumlah produksi dan produktivitas padi yang berpotensi mengakibatkan hambatan dalam mewujudkan swasembada pangan. Usahausaha yang harus dilakukan adalah mengembangkan area pertanian tanaman pangan dengan menyusun strategi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian secara berkelanjutan dan pencegahan berkurangnya lahan sawah produktif, terutama untuk lahan beririgasi teknis yang sudah dikembangkan dan lahan produktif lainnya. Kegiatan budidaya pertanian lahan basah dan food estate merupakan lahan sawah, baik yang beririgasi teknis, setengah teknis, maupun irigasi perdesaan yang telah diusahakan secara intensif. Kawasan lahan pertanian diharapkan dapat tetap dipertahankan dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan budaya. Kawasan budidaya pertanian lahan basah di wilayah perencanaan selain dikembangkan untuk produksi pangan juga diarahkan sebagai kawasan penyangga (buffer zone) untuk menjaga kualitas lingkungan dalam bentuk jalur hijau atau ruang terbuka hijau. Kawasan budidaya pertanian lahan basah terutama yang telah terlayani jaringan irigasi merupakan kawasan yang tetap dipertahankan dengan meminimasi alih fungsi ke kegiatan budidaya lainnya. Lahan food estate yang merupakan areal lahan pertanian pangan berkelanjutan dicadangkan di 4 (empat) kecamatan yaitu Busang, Karangan, Muara Ancalong dan Sandaran dengan luas 63.202,78 ha, sementara itu lahan pertanian pangan direncanakan seluas lebih kurang 107.755,37 ha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur merupakan lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya.

**4.2 Hasil Penelitian**

Untuk mengetahui pelaksanaan *environmental governance* dalam penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur. Maka akan dianalisa melalui empat aspek yaitu sosial, ekonomi, lingkungan/ekologi, dan aspek estetika. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

* + 1. **Aspek Sosial**

Untuk memperoleh penjelasan mengenai aspek sosial ini terlebih dahulu dikemukakan alasan mengenai pentingnya taman Bukit Pelangi dibangun, hal ini dikemukakan oleh informan Kasubag Rumah Tangga Umum Setkab Kutai Timur yang mengemukakan bahwa:

“alasan dibuatnya taman unik di Bukit Pelangi tidak lain untuk memanjakan masyarakat Kutim maupun pendatang luar daerah yang bertandang di pusat pemerintahan Pemkab ini. Selain itu, tentu untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap asri dan menyehatkan”

(Hasil wawancara tanggal 2 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa alasan pembuatan taman unik di Bukit Pelangi selain alasan lingkungan juga untuk memanjakan masyarakat Kutai Timur dan Pendatang dari luar Kutai Timur. Hal yang ingin dilihat pertama dalam penelitian ini adalah aspek sosial mencakup keamanan dan partisipasi yang dapat memberikan ruang masyarakat seperti untuk melakukan kegiatan sosial yang aktif dan pasif di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur.

Untuk menjelaskan aspek sosial ini maka dilakukan wawancara dengan informan Kasubag Rumah Tangga Umum Setkab Kutai Timur yang mengemukakan bahwa:

“sebelum adanya ruang terbuka hijau di kawasan bukit pelangi, kondisi kawasan Bukit pelangi hanya ramai di saat jam kerja khusus pegawai pemerintahan yaitu mulai hari senin-jumat, sedangkan di jam lainnya tidak ada aktifitas masyarakat. Padahal luas kawasan tersebut mencapai 62 ha. Jadi banyak lahan-lahan kosong yang tidak dimanfaatkan oleh pemerintah. Saat ini kondisi sosial yang berlangsung sudah efektif terlihat dari antusias masyarakat yang senang berkunjung ke bukit pelangi”

(Hasil wawancara tanggal 11 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kondisi bukit pelangi hanya ramai pada saat jam kerja khususnya pegawai pemerintahan yang berada di sekitar bukit pelangi sementara untuk aktivitas masyarakat tidak begitu maksimal namun saat ini kondisi sosial sudah diefektifkan untuk penggunaan lahan terbuka hijau hal ini sudah terlihat dari aktivitas masyarakat yang sudah rutin berkunjung ke bukit pelangi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Pelaksana RTH Kabupaten Kutai Timur mengemukakan bahwa:

“Kondisi masyarakat sebelum adanya RTH mereka yang dulunya tidak pernah mengunjungi kawasan bukit pelangi sekarang menjadi kawasan favorit bagi warga sangatta. Setelah adanya RTH ketika weekand masyarakat tidak lagi tertumpu hanya pada 1 atau 2 tempat yang dulunya tertumpuk di STQ atau Townhall sekarang sudah mulai terbagi”

(Hasil wawancara tanggal 14 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kondisi sosial masyarakat yang telah berbeda saat ini di mana bukit pelangi telah menjadi kawasan favorit bagi warga sangat. Hal ini terlihat dari kondisi sosial masyarakat yang mulai berkumpul pada Kawasan Bukit Tinggi padahal sebelumnya banyak yang berkumpul di STQ atau Townhall.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Pengawas Lapangan Taman yang mengemukakan bahwa:

“sangat berbeda jauh sekali dari sekarang sebelum adanya RTH kawasan ini Sangat Sepi. Setelah Adanya RTH Kawasan Bukit Pelangi Menjadi Kawasan Pusat Pemerintahan yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat. Aktivitas di dalamnya. Sekarang sudah banyak kegiatan keagamaan juga kegiatan komunitas-komunitas kegiatan olahraga pokoknya sekarang banyak manfaatnya”

(Hasil wawancara tanggal 12 Maret 2020)

Selain hasil wawancara dengan informan masyarakat menjelaskan tentang aspek sosial RTH, hal ini sesuai yang diungkapkan informan masyarakat Sri yang mengatakan bahwa:

“Saya pribadi hanya sekedar membawa anak-anak jalan-jalan tetapi terkadang saya melihat ada beberapa keluarga yang datang sambil membawa bekal berkumpul bersama keluarga seperti piknik keluarga yang tentu menyenangkan buat kami”

(Hasil wawancara tanggal 11 Maret 2020)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan masyarakat lainnya yaitu Dewi yang mengemukakan bahwa:

“Pernah sesekali ada kegiatan sekolah yang dilakukan disini itu ketika anak saya melakukan kegiatan bermain di arena taman Venus kegiatan dari sekolah. Kegiatannya dilakukan di gazebo yang ada ditaman dan itu memberikan rasa aman”

(Hasil wawancara tanggal 12 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat memperoleh manfaat sosial dari keberadaan RTH. Selain itu berdasarkan rangkaian hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari aspek sosial keberadaan RTH Bukit Pelangi sangat memberikan manfaat yang besar antara lain aktivitas-aktivitas komunitas dan kegiatan olahraga. Aspek sosial keberadaan RTH memang diperuntukkan untuk kegiatan sosial masyarakat hal ini mendukung agar kehidupan alam dan manusia yang berada di sekitar RTH sehat secara jasmani dan berinteraksi secara sosial.

* + 1. **Aspek Ekonomi**

Aspek ekonomi diartikan sebagai keberadaan ruang terbuka hijau memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar secara ekonomi di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur. Untuk memperoleh penjelasan mengenai hal tersebut maka dilakukan wawancara dengan informan masyarakat Ibu Lia yang mengemukakan bahwa:

“Saya kebetulan bekerja di kawasan Pusat pemerintahan Bukit Pelangi. Kegiatan berkumpul yang pernah kami lakukan yaitu ketika kegiatan anniversary kantor atau family gatering biasanya kami menggunakan taman RTH”

(Hasil wawancara tanggal 12 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat kegiatan perekonomian yang dilakukan melalui kegiatan family gathering hal ini tentu berhubungan dengan aspek sosial namun acaranya tentu memerlukan konsumsi dan akomodasi perlengkapan yang dapat memberikan ruang kegiatan ekonomi bagi masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan masyarakat Ibu Sri yang mengemukakan bahwa:

“Ada pedagang-pedagang yang berjualan disekitar taman. Kami bersyukur karena pemerintah menyediakan food cord yang dimana masyarakat ikut terlibat didalamnya karena saya melihat banyak pedagang-pedagang mulai dari berbagai macam jajanan dan minuman juga permainan anak-anak”

(Hasil wawancara tanggal 8 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawacara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi di area RTH Bukit pelangi dan pedagang-pedagang dapat berjualan dengan memanfaatkan food cord yang tersedia. Adapun yang tersedia adalah berbagai aneka jajanan dna minuman disamping itu ada juga tersedia permainan anak kondisi ini medukung perekonomian masyarakat berputar dengan adanya RTH Bukut pelangi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Ibu Lia yang mengemukakan bahwa:

“Ada ekonomi yang berputar karena fasilitas taman sering digunakan oleh beberapa pihak mulai dari pihak swasta dan juga kegiatan sekolah taman kanak-kanak juga adanya lapak yang disiapkan oleh Pemerintah untuk masyarakat yang mau berjualan untuk menambah mata pencaharian”

(Hasil wawancara tanggal 12 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa fasilitas taman RTH sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak swasta untuk melakukan aktivitas perekonomian dan juga pedagang dan masyarakat dapat memanfaatkan lapak yang disiapkan di area taman. Aspek ekonomi memang tidak dapat dilepaskan dari area publik di samping sarana tempat bersosialisasi kegiatan ekonomi juga dapat berputar karena adanya aktivitas manusia didalamnya.

**BAB.V PENUTUP**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada aspek kondisi sosial masyarakat yang telah berbeda saat ini di mana bukit pelangi telah menjadi kawasan favorit bagi warga sangat. Hal ini terlihat dari kondisi sosial masyarakat yang mulai berkumpul pada Kawasan Bukit Tinggi padahal sebelumnya banyak yang berkumpul di STQ atau Townhall. Masyarakat memperoleh manfaat sosial dari keberadaan RTH. Keberadaan RTH Bukit Pelangi sangat memberikan manfaat yang besar antara lain aktivitas-aktivitas komunitas dan kegiatan olahraga. Aspek sosial keberadaan RTH memang diperuntukkan untuk kegiatan sosial masyarakat hal ini mendukung agar kehidupan alam dan manusia yang berada di sekitar RTH sehat secara jasmani dan berinteraksi secara sosial. Pada aspek ekomomi masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi di area RTH Bukit pelangi dan pedagang-pedagang dapat berjualan dengan memanfaatkan food cord yang tersedia. Adapun yang tersedia adalah berbagai aneka jajanan dna minuman disamping itu ada juga tersedia permainan anak kondisi ini medukung perekonomian masyarakat berputar dengan adanya RTH Bukut pelangi. Dari aspek ekologi pemilihan RTH sudah dianggap tepat dan masyarakat dapat memanfaatkan sebagai sarana pendidikan ekologi masyarakat khusus siswa-siswa yang ingin belajar. Namun terdapat kekurangan dalam hal spesies tanaman dan binatang khas Kalimantan seharusnya menjadi ciri khas RTH bukit pelangi ini.

Kemudian dari aspek estetika menunjukkan RTH Bukit Pelangi kebanyakan menilai bahwa tampilan RTH sudah cukup menarik dan tertata rapi hal yang berikan kesan istimewa bagi masyarakat yang berkunjung.

* 1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan di atas, maka sebagai saran terkhusus kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur yaitu:

* + - 1. Peningkatan sarana food cord perlu tetap memperhatikan kebersihan pedagang dan pembeli meskipun terdapat petugas yang bekerja membersihkan taman namun kesadaran masyarakat tetap diperlukan.
      2. Kawasan Pusat Pemerintah Bukit Pelangi perlu memperbanyak aneka macam flora dan fauna yang mencerminkan karakteristik taman yang merupakan daerah tropis yang kaya keanekaragaman hayati dan fauna.

**DAFTAR PUSTAKA**

Akib, M. (2014). Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: dari Mekanistik-reduksionis ke Holistik-ekologi. Masalah-Masalah Hukum, 43(1), 125-131.

Desfandi, M. (2015). Mewujudkan masyarakat berkarakter peduli lingkungan melalui program adiwiyata. SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 2(1), 31-37.

Dwiyanto, A. (2009). Kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di permukiman perkotaan. Teknik, 30(2), 88-92.

Faisah, N., & Prianto, A. L. (2015). Good Environmental Governance (Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan Di Kota Makassar. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2).

Faisah, N., & Prianto, A. L. (2015). . Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2).

Faisah, N., & Prianto, A. L. (2015). Good Environmental Governance (Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan Di Kota Makassar. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2).

Irwan, Z. D. (2003). Hutan Kota dan Lingkungan Kota. Makalah Seminar Pada Fakultas Arsitektur Lanskap Teknik Lingkungan Universitas Trisakti. Jakarta

Kooiman, J. (2003). Governing as governance. Sage.

Lestari, S. P. (2014). Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City (Studi pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2012-2032). Jurnal Administrasi Publik, 2(3), 381-387.

Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: Politeknik Kridatama Bandung.

Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.

Nahruddin, Z. (2018). Isu-Isu Strategis Permasalahan Lingkungan Hidup. Osf.io

Nangkoda, H. Y. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Tata Kelola Lingkungan Hidup Di Sekitar Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lex Et Societatis, 5(3).

Pataki, et. al. (2011). Coupling biogeochemical cycles in urban environments: ecosystem services, green solutions, and misconceptions. The Ecological Society of America 9 (1): 27–36

Prihatiningtyas, W. (2019). Pengelolaan Wilayah Laut Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance. Media Iuris, 2(2), 279-300.

Putri P. 2010. Analisis spasial dan temporal perubahan luas ruang terbuka hijau di Kota Depok. Jurnal Lanskap Indonesia, 2(2): 115-121.

Rahmy, W. A., Faisal, B., & Soeriaatmadja, A. R. (2012). Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat, Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung. Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia, 1(1), 27-38.

Rijal, S. (2008). Kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Makassar tahun 2017. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 3(1).

Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama.

Setyawan, Dharma Salam, (2004). Otonomi Daerah dalam perspektif lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Djambatan, Jakarta

Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM, 6.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.

Sumarto, S. S. (2003). Inovasi, partisipasi dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.

Tinambunan, R. S. (2006). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota pekan Baru. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Vada, W. A., & Tinov, M. T. (2015). Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2(1).